

PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI JATIM

Lailatul Badriyah

ryalaila@gmail.com

Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Capital Expenditure is one of the budget expenditures which have objectives in order to gain or add some other beneficial assets and bigger profits compared to one period of accounting. While there were some factors which affect the capital expenditure namely, Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Specific Allocation Fund. Therefore, this research aimed to find out the effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Specific Allocation Fund on Capital Expenditure of districts/cities in East Java province during 2017-2020. The research was quantitative, in which it analyzed certain populations or samples. The population was all districts/cities in East Java province. In line with that, there were 37 districts/cities which fulfilled the criteria given during 2017-2020. Moreover, the data were secondary in form of Realization Report of Local Budget during 2017-2020. The research result concluded that both Local Budget and General Allocation Fund had a positive and significant effect on Capital Expenditure. On the other hand, Specific Allocation Fund had a negative and insignificant effect on Capital Expenditure.

Keywords: local-owned source revenue, general allocation fund, specific

ABSTRAK

Belanja Modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran anggaran yang memiliki tujuan agar dapat memperoleh atau menambah suatu aset lainnya yang dapat memberikan manfaat serta keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan 1 (satu) periode akuntansi. Adapun beberapa faktor yang memungkinkan mempengaruhi Belanja Modal yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian metode kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang meneliti populasi maupun sampel tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020 namun yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan hanya 37 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2017-2020. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan bersifat signifikan terhadap Belanja Modal sementara Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak bersifat signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal

PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dinyatakan apabila otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang serta kewajiban pada daerah otonomi dalam urusan mengatur dengan sendiri dalam hal persoalan Pemerintahan maupun hal kepentingan pada masyarakat sekitar dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya Otonomi Daerah yang terdapat pada Negara Indonesia diharapkan akan terjadinya kenaikan pada pelayanan Sektor Publik seperti membantu untuk memajukan perekonomian pada daerah

yang ada di Indonesia serta meningkatkan daya minat bagi seorang investor agar dapat dipercayai untuk ditanamkan modalnya pada suatu daerah tersebut. Adapun beberapa faktor yang mendukung dalam proses peningkatan kepercayaan pada Publik didalam investasi modal yaitu seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Pemerintah Daerah telah melakukan pengalokasian dana yang bergolong anggaran belanja modal pada APBD dengan bertujuan agar dapat menambahkan aset tetap. Menurut Halim (2014:229) Belanja Modal merupakan salah satu kumpulan dari belanja daerah yang telah dipakai dalam proses pembelian dan penyediaan barang berwujud yang memiliki kegunaan yaitu 1 (satu) Tahun lebih untuk digunakan dalam proses pembangunan prasarana, sarana serta penyediaan pada suatu fasilitas pada Publik. Dalam proses meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang ada pada daerah, pihak Pemerintah Pusat melakukan pemantauan kepada Pemerintah daerah dengan bertujuan agar jumlah presentase Belanja Modal selalu mengalami kenaikan terus menerus yaitu dengan sebesar 30%. Menurut Felix (2012) terjadinya peningkatan pada Belanja Modal anggaran tersebut membuat suatu pencapaian pada Belanja Modal terkaitnya penambahan pada infrastruktur, sarana dan prasarana pada Publik. Belanja Modal juga bersangkutan dengan perencanaan keuangan jangka panjang yang utama yaitu pembayaran agar dapat memelihara aset tetap yang diperoleh dari Belanja Modal tersebut.

Pemerintah diharapkan untuk bersedia mengambil keuangan dengan bertujuan agar dapat memenuhi adanya kebutuhan biaya pada Pemerintah dan biaya pembangunan suatu Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan pada suatu daerah yang asal mulanya dari biaya hasil pajak, biaya hasil retribusi pada daerah serta biaya hasil dari pengolahan kekayaan pada suatu Daerah yang telah mengalami proses pemisahan antara lain hasil dari Pendapatan Asli Daerah yang sah sudah memiliki tujuan untuk kedepannya dalam persoalan memberikan keleluasan pada daerah dalam menggali pendanaan pada saat pelaksanaan otonomi daerah dengan suatu perwujudan asas desentralisasi (Badrudin, 2017). Dengan terdapatnya Pendapatan Asli Daerah bisa dilihat dari jumlah keuangan pada setiap Kabupaten/Kota, oleh karena itu tingkat kinerja pada keuangan diharapkan agar dapat menjadi lebih baik lagi dengan cara perbaikan serta peningkatan. Berdasarkan adanya penelitian yang telah dilakukan (Badjra, *et al*, 2017) menyatakan bahwa hasil dalam pengujian hipotesis telah menunjukkan jika Pendapatan Asli Daerah mendapatkan hasil berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmat, 2018) dalam penelitian tersebut mengatakan apabila Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Setiap Daerah memiliki perbedaan keahlian khususnya pada bidang keuangan dan perbedaan dalam urusan mengatasi masalah seperti membiayai kegiatan-kegiatan setiap daerah hal tersebut membuat terjadinya ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Agar dapat mengatasi suatu ketimpangan tersebut pihak Pemerintahan pusat memberikan dana perimbangan yang akan diberikan dengan bentuk dana perimbangan yang berasal dari Pemerintahan pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah mengalami alokasi dengan bertujuan untuk dapat meratakan keuangan pada setiap daerah dalam hal mendanai kebutuhan pada Pemerintah daerah pada saat terjadinya desentralisasi. Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Tiningrum *et al.*, 2020) memberikan hasil bahwa pada penelitian Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal berpengaruh positif dan bersifat signifikan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hairiyah *et al.*, 2017) memberikan hasil bahwa Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal memberikan hasil yang tidak berpengaruh positif namun bersifat signifikan.

Selain Dana Alokasi Umum terdapat Dana Alokasi Khusus yang merupakan suatu dana yang dihasilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah dialokasikan pada beberapa Daerah tertentu yang telah dipilih dengan maksud untuk pemerataan pada setiap daerah tertentu. Manfaat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih difokuskan pada suatu kegiatan pembangunan, proses peningkatan serta perbaikan bangunan serta prasarana fisik dalam pelayanan pada Publik dengan batas umur ekonomis yang panjang. Adanya kegiatan tersebut diharapkan agar mampu untuk meningkatkan adanya pelayanan pada Publik yang dapat diwujudkan dalam Belanja Modal. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Novianto *et al.*, 2015) dapat dikatakan pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) mendapatkan hasil berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Namun berbeda dengan penelitian (Santoso *et al.*, 2021) bahwa penelitian tersebut mengatakan jika Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah seperti berikut: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?, (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur?, (3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur?. Dengan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: (1) Untuk menguji Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, (2) Untuk menguji Dana Alokasi Umum berpengaruh Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, (3) Untuk menguji Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

TINJAUAN TEORITIS

Teory Keagenan (*Agency Theory*)

Teory keagenan menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu persetujuan ataupun kontrak antara kedua belah pihak yang dimana pihak pertama berisikan prinsipal dan pihak kedua berisikan agen, pihak prinsipal melakukan penyerahan sebuah wewenang kepada pihak agen agar dapat mengambil tindakan keputusan yang diatas namakan prinsipal (Jensen *et al.*, 1976 dalam Yovita, 2011). Terdapat adanya perbedaan dalam kepentingan agen maupun prinsipal, sehingga pada pihak agen dengan senantiasa melakukan suatu tindakan yang paling baik bagi suatu kepentingan pihak prinsipal. Masalah keagenan yang dimana terjadi dalam masalah pemerintahan, pihak Pemerintah pusat bertindak sebagai agen sedangkan pihak rakyat bertindak sebagai prinsipal. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah menyatakan apabila Bupati beserta Walikota dipilih dengan berdasarkan atas suara rakyat yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban tentang adanya program Pemerintahan. Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini yaitu antara legislatif dengan eksekutif yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif yang berperan sebagai pihak prinsipal, sedangkan pada pihak Pemerintah Daerah berperan sebagai eksekutif yang berperan sebagai agen.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu bentuk rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disusun dengan berdasarkan peraturan daerah. Di sisi lain APBD dapat menjadi suatu sarana agar dapat mengetahui bagaimana kemampuan pada masing masing daerah tersebut dalam hal pendapatan maupun belanja. Anggaran daerah dalam APBD merupakan suatu instrumen yang utama bagi pihak pemerintah daerah dikarenakan menduduki bagian yang sentral dalam usaha memperkembangkan kemampuan

serta efektivitas pemerintah daerah. Anggaran dapat menjadi sebuah alat bagi ekonomi yang menjadi hak pemerintah agar dapat mengubah perkembangan masyarakat khususnya pada bagian ekonomi, sosial serta memungkinkan agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan pada masyarakat. Anggaran daerah menjadi salah satu sebab yang digunakan untuk mengendalikan peranan penting dalam urusan untuk menaikkan pelayanan dalam publik serta didalamnya terdapat kebutuhan untuk masyarakat dengan melihat kemampuan yang dimiliki serta memperhatikan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Nurcholis (2007:182) bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu penerimaan dari pendapatan yang telah dihasilkan melalui Peraturan Daerah yang sesuai dengan penetapan yang terdapat didalam Undang-Undang yang bersumber dari pajak daerah, laba perusahaan daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan daerah merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap daerah, oleh karena itu pihak Pemerintah daerah diharapkan agar mampu menciptakan suatu hal yang lebih baik untuk Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mendanai adanya pengeluaran yang telah dilakukan oleh setiap daerah serta tidak menjadikan sebagai bentuk hambatan pada kegiatan ekonomi yang berhubungan pada daerah. Sumber pada Pendapatan Asli Daerah berasal dari adanya pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan yang terdapat pada suatu daerah (Halim, 2014:169). Menurut Mahmudi (2009:18) jika tingginya kemampuan pada suatu daerah dalam hal menghasilkan suatu Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi pula ketetapan dan tindakan pada suatu daerah dalam urusan menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang telah mengalami penyesuaian berdasarkan dengan kebutuhan dan pembangunan pada daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah telah memiliki tujuan untuk memberikan sebuah wewenang kepada Pemerintah Daerah agar dapat membiayai kegiatan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap daerah dengan sebagai bentuk pembuktian dalam desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan suatu hasil pendapatan Daerah yang asal mulanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian mengalami pengalokasian untuk daerah agar mempunyai tujuan dalam pencapaian pemerataan kemampuan atas keuangan antar daerah pada pelaksanaan desentralisasi. Pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJPK telah melakukan pembuktian jika Dana Alokasi Umum mempunyai suatu tujuan yaitu sebuah proses kemampuan pada Daerah dalam hal keuangan agar dapat memenuhi semua kebutuhan pada daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsep adanya kesenjangan fiskal ini bertujuan agar dapat mengalokasikan Dana Alokasi Umum yang sudah dilaksanakan pemungutan pada Indonesia agar dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang ada diantaranya terdapat pada kebutuhan dan kemampuan fiskal pada Pemerintah daerah. Terdapat tujuan dari adanya transfer yaitu dapat menjadi penutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Dengan keberadaan *fiscal gap* yang diharapkan kedepannya dapat membantu dalam kesenjangan fiskal yang merupakan perselisihan antara negatif dengan kebutuhan fiskal yang terdapat pada kapasitas fiskal yang dianggap sebagai suatu kebutuhan yang menanggung penutupan melalui transfer pada pihak Pemerintah Pusat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian mengalami pengalokasian untuk daerah namun hanya tertentu saja dengan bermaksud dapat membantu membiayai adanya kegiatan khusus yang masih

terdapat adanya hubungan dengan Pemerintah daerah yang mempunyai hak kekuasaan daerah serta yang memiliki standar yang sesuai dengan prioritas Nasional. Dana Alokasi khusus akan sepenuhnya digunakan dalam Belanja Modal agar dapat meningkatkan dan mensejahterahkan fasilitas yang ada pada Publik serta terdapatnya Dana Alokasi Khusus juga dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan biaya operasional pembangunan seperti perjalanan Dinas dan lain sebagainya. Kriteria teknis sudah diputuskan oleh kementerian Negara atau lembaga teknis sesuai dengan apa yang dipakai oleh indikator yang dapat menggambarkan suatu kondisi prasarana atau sarana pada bidang tertentu yang kemungkinan dapat dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus. Adapun terdapat beberapa bidang yang dapat dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus menurut ketentuan yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, bangunan, infrastuktur air minum, prasarana Pemerintahan desa, prasarana kawasan yang sangat terbatas, pada kelautan atau perikanan, pertanian dst. Setiap daerah penerimaan Dana Alokasi Khusus mewajibkan agar menyiapkan dana pendamping dengan sekecil-kecilnya 10% dari alokasi Dana Alokasi Khusus dengan pengecualian pada daerah kemampuan fiskal tertentu yaitu daerah yang mempunyai selisih diantaranya pada penerimaan umum APBN serta belanja pada pegawainya dengan nol atau negatif dan tidak diharuskan untuk menyediakan dana pendamping (Basuki, 2008:82).

Belanja Modal (BM)

Menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Belanja Modal merupakan suatu pengeluaran yang telah dilakukan dengan tujuan pembetulan modal bersifat aset tetap atau inventaris yang akan memberikan manfaat untuk kedepannya selama lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang termasuk juga didalamnya yaitu suatu pengeluaran untuk biaya proses yang mempunyai sifat yang dapat memelihara, mengawasi dan meningkatkan waktu manfaatnya namun tidak hanya itu saja manfaat yang lainnya dapat meningkatkan ruang dan mutu pada aset. Belanja Modal digunakan dalam mendapatkan aset tetap pada Pemerintahan daerah seperti contohnya infrastruktur, bangunan, peralatan, harta tetap yang lainnya. Adapun beberapa jenis yang termasuk kedalam Belanja Modal yaitu belanja tanah, belanja gedung, belanja peralatan, belanja jalan serta belanja aset tetap lainnya. Menurut Halim (2007:101) Belanja Modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran anggaran agar dapat memperoleh suatu aset lainnya dengan bertujuan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dalam 1 (satu) periode akuntansi. Adapun bentuk cara agar dapat mendapatkan Belanja Modal yaitu dengan menggunakan cara lelang maupun cara tender.

Pengembangan Hepotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Dengan semakin banyak biaya Pendapatan Asli Daerah maka semakin mampu daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan yang ada tanpa harus terikat pada pihak Pemerintahan pusat. Dengan terjadinya hal tersebut membuktikan bahwa daerah tersebut mampu untuk berjalan mandiri. Apabila terjadinya Pendapatan Asli Daerah meningkat maka pada investasi Belanja Modal pada Pemerintahan daerah juga diharapkan agar dapat meningkat. Didalam penelitian yang telah dilakukan oleh Juniawan *et al.*, (2018) Pendapatan Asli Daerah mendapatkan hasil yang berpengaruh positif dan bersifat signifikan terhadap Belanja Modal. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa, *et al* (2013) Pendapatan Asli Daerah memiliki hasil yang berpengaruh positif dan bersifat signifikan terhadap Belanja Modal. Berlaku juga pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti *et al.*, (2016) Pendapatan Asli Daerah memiliki hasil yang bersifat signifikan dan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum dikendalikan dengan secara penuh oleh pihak Pemerintahan daerah sesuai dengan penggunaan keperluan yang terjadi pada suatu daerah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya kegiatan transfer yang cukup penting yang berasal dari pihak Pemerintahan pusat yang akan diberikan kepada pihak Pemerintahan daerah sehingga Pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan bertujuan dapat melaksanakan suatu fungsi pelayanan dasar umum dengan melakukan pengalokasian Dana Alokasi Umum yang sudah disediakan oleh Alokasi Belanja Modal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurzem (2016) Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal memberikan hasil berpengaruh positif dan bersifat signifikan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2013) Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal mendapatkan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Berlaku juga juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.*, (2018) Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal mendapatkan hasil berpengaruh positif dan bersifat signifikan.

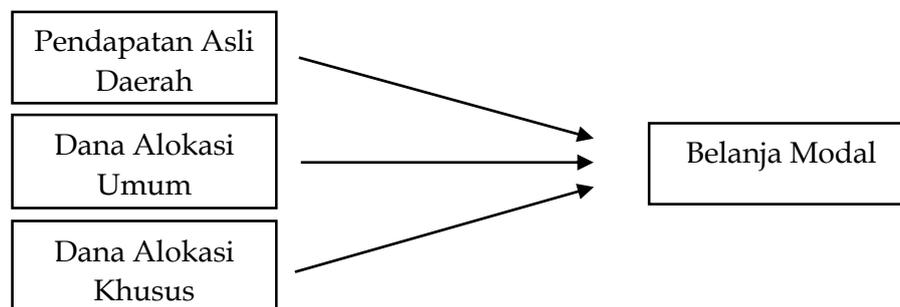
H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dengan diadakannya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan agar dapat mempengaruhi adanya Belanja Modal, karena dengan adanya Dana Alokasi Khusus pada belanja modal akan membuat suatu peningkatan serta perubahan. Pada pelayanan Publik secara otomatis juga akan ikut meningkat dikarenakan akan terjadi perubahan naiknya aset tetap pada Pemerintahan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jemparut (2017) Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal mendapatkan hasil pengaruh positif. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiningrum *et al.*, (2020) Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2017 mendapatkan hasil berpengaruh positif dan bersifat signifikan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Santosa *et al.*, (2013) Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal mendapatkan hasil tidak berpengaruh positif atau berpengaruh negatif dan tidak bersifat signifikan.

H₃ : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal

MODEL PENELITIAN



Gambar 1
Rerangka Konseptual
Sumber: data sekunder diolah tahun 2022

Penelitian Terdahulu

Penelitian Sularso *et al.*, (2011). Dengan berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pada hasil penelitian tersebut memberikan hasil indikasi derajat desentralisasi tidak memiliki Pengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal, apabila semakin baik kinerja keuangan Pemerintah daerah maka terjadi semakin tingginya juga pada alokasi Belanja Modal.

Sedangkan pada hasil alokasi Belanja Modal memberikan hasil yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (1). Penelitian Abdullah *et al.*, (2014). Dengan berjudul Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian tersebut mengatakan pengaruh variabel bebas Perubahan Sisa Anggaran (PSA) terhadap variabel terikat Perubahan Belanja Modal (PBM) mendapatkan hasil secara statistik signifikan. Namun berbeda dengan pengaruh variabel bebas perubahan Pendapatan Asli Daerah terhadap variabel terikat perubahan Belanja Modal mendapatkan hasil statistik tidak signifikan. Sedangkan pada pengaruh variabel bebas perubahan Dana Bagi Hasil terhadap variabel terikat perubahan Belanja Modal mendapatkan hasil statistik signifikan (2). Penelitian Nurzem (2016). Dengan berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian tersebut mengatakan hasil dari variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun berbeda dengan variabel Pendapatan Asli Daerah mendapatkan hasil berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Belanja Modal. Berlaku sama seperti variabel sebelumnya variabel Dana Alokasi Umum juga mendapatkan hasil bahwa berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (3).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Metode penelitian

Penelitian ini merupakan metode kuantitatif yang dapat diartikan dapat diartikan dengan metode penelitian yang melandaskan pada filsafat positivisme, yang dapat digunakan dalam meneliti suatu populasi ataupun suatu sampel yang sudah ditetapkan. Dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif atau bersifat statistik. Sumber pengumpulan data dengan menggunakan sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada periode 2017-2020 yang dapat diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan penentuan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara *purposive sampling*. Teknik sampel *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan adanya suatu pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Pemilihan metode ini dikarenakan informasi yang diambil berasal dari satu populasi yang sudah dipilih dan berdasarkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur meliputi 38 Kabupaten/Kota yang menyediakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara lengkap Tahun 2017-2020.

Variabel Dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu sumber penerimaan yang menjadi harapan suatu pertumbuhannya bagi daerahnya sendiri yang diambil dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan di Undang-Undang yang telah berlaku.

$PAD = \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi Daerah} + \text{Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang telah dipisahkan} + \text{Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah}$

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yaitu suatu dana yang asal mulanya dari pendapatan APBD yang telah mengalami pengalokasian dengan berdasarkan adanya suatu tujuan pemerataan

kemampuan pada keuangan antara daerah dengan sebuah harapan agar dapat membiayai adanya kebutuhan daerah maupun dalam keadaan adanya kegiatan-kegiatan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum Kabupaten/kota = $90\% \times 25\% \times \text{Pendapatan Dalam Negeri} \times \text{Bobot Dana Alokasi Umum}$

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan suatu dana yang berasal dari APBN yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan bertujuan agar dapat membiayai adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus dalam menjalankan suatu urusan proses pembangunan prasarana dan sarana pada Publik di Kabupaten/Kota yang sudah menjadi urusan pada daerah sesuai dengan adanya prioritas Nasional.

Dana Alokasi Khusus = $\text{Bobot Daerah (IFW} \times \text{IKK)} + \text{Bobot Teknis (IT} \times \text{IKK)}$

Variabel Dependen

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan suatu pengeluaran yang telah dilakukan dengan tujuan pembetukkan modal yang bersifat aset tetap atau inventaris yang kedepannya akan memberikan suatu manfaat yang dapat melebihi 1 (satu) periode akuntansi termasuk juga didalamnya.

Belanja Modal = $\text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset Lainnya}$

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data digunakan dikarenakan agar mendapatkan hasil yang pasti dalam pengeloaan sebuah data, sehingga data tersebut dapat untuk dipertanggungjawabkan. Analisis data merupakan suatu bentuk untuk dapat mengelolah sebuah data yang diharapkan agar dapat menjadi suatu informasi serta mempunyai sifat yang lebih mudah untuk dipahami, bermanfaat serta dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan tentang sebuah masalah yang sedang diteliti. Data yang diolah maupun dianalisis dengan menggunakan alat bantu berupa Perangkat Lunak Statistik (*Statistic Software*) yang biasa disebut SPSS.

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147) Analisis Statistik Deskriptif merupakan statistik yang dapat digunakan agar dapat menganalisis suatu data yang sudah dikumpulkan dengan sebagaimana yang ada dengan maksud tidak membuat adanya kesimpulan yang diberlakukan untuk umum atau generalisasi. Pendekatan deskriptif digunakan agar dapat memperjelas adanya fakta yang ada pada variabel yang akan diteliti agar dapat mengetahui gambaran tersebut dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standart deviation, nilai maksimum dan nilai terendah dengan cara menggunakan seluruh jumlah yang ada pada variabel

Uji Asumsi klasik

Normalitas

Pengujian normalitas mempunyai tujuan yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual saling memiliki ditribusi normal atau tidak. Apabila jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid jika digunakan untuk jumlah sampel yang relatif kecil. Pengujian normalitas melamapaui analisis grafik yaitu

dengan menggunakan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan agar dapat mengetahui apakah model regresi didapatkan adanya korelasi antara variabel independen. Terdapatnya model yang baik seharusnya tidak akan terjadi adanya korelasi pada variabel independen. Adapun cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika terdapatnya nilai *tolerance* > 0.10 atau jika sama dengan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011).

Uji Autokorelasi

Pengujian ini memiliki tujuan agar dapat menguji apakah didalam model regresi terdapat adanya korelasi diantara kesalahan pada pengganggu yang ada pada periode t dengan adanya kesalahan pengganggu pada periode t-1 pada sebelumnya (Ghozali, 2011). Menurut Firdaus (2010) apabila nilai *durbin watson* = 1,55 - 2,46 maka dapat disimpulkan tidak terjadi apa-apa. Autokorelasi dapat muncul dikarenakan adanya observasi dengan secara berurutan dalam sepanjang waktu yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini mempunyai tujuan agar dapat menguji apakah didalam model regresi mengalami perbedaan variabel pengganggu dan residual dengan menggunakan satu pengamatan yang ditunjukkan kepada pengamatan yang lain. Agar dapat diketahi adanya heteroskedastisitas maka dilakukannya dengan adanya pendekatan *scatter plot* diantara suatu prediksi variabel yang terkait antara residualnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi merupakan suatu model analisis yang dapat dipergunakan dalam mengukur terdapatnya kekuatan hubungan diantara dua variabel yang ada (Ghozali, 2013:95). Analisis regresi linier berganda digunakan agar dapat melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hubungan antar variabel yang ada dapat digunakan dengan persamaan yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1PAD + \beta_2DAU + \beta_3DAK + e$$

Yang dimana:

Y	: Belanja Modal
A	: Konstanta
B	: Slope Atau Koefisien Regresi
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
E	: <i>error</i>

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam proses menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Dengan nilai koefisiensi yang semakin tinggi maka hasil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mendapatkan hasil yang sangat baik pula (Ghozali, 2006). Nilai koefisiensi determinasi merupakan diantara (0) nol dan (1) satu. Nilai R² yang memiliki nilai yang kecil

mempunyai kemampuan variabel independen dalam proses menjelaskan variasi variabel dependen mempunyai waktu yang sangat amat terbatas. Dan nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen akan memberikan adanya suatu informasi yang akan dibutuhkan agar dapat memprediksi adanya variasi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (F)

Pada uji saat ini dilakukan agar dapat menguji adanya tingkat keeratan atau yang dapat disebut keterikatan diantara variabel dependen dan juga variabel independen, yang akan dilihat dari nilai Sig 0.05. Agar dapat mengetahui dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel yaitu dengan cara apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig < 0.05$ maka dari itu model regresi dinyatakan untuk layak di uji, namun apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig > 0.05$ hal tersebut menyatakan bahwa model tersebut belum layak di uji.

Uji Parsial (t)

Uji parsial merupakan uji untuk mempertimbangkan antara nilai yang signifikan uji t dengan alfa 5% (Ghozali, 2011). Uji parsial (t) dimaksudkan agar dapat mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen dengan adanya asumsi variabel bebas lainnya konstan (Ghozali, 2013:98). Dengan adanya asumsi jika bahwa nilai t hitung yang dilihat dari analisis regresi akan menunjukkan nilai yang kecil dari $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan jika hipotesis yang telah diajukan dapat diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam menjelaskan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan variabel dependen yaitu Belanja Modal.

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	148	25,63	29,31	26,5962	0,70700
DAU	148	25,65	28,20	27,5145	0,35791
DAK	148	23,02	27,11	26,0819	0,77762
BM	148	25,06	28,64	26,5666	0,61087
Valid N (listwise)	148				

Sumber: data sekunder diolah tahun 2022

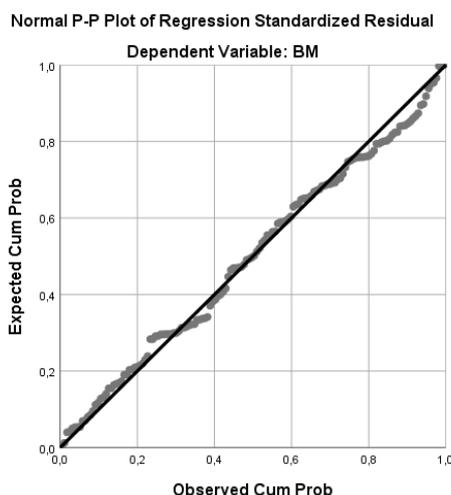
Berdasarkan dari Tabel 1 hasil dari analisis statistik deskriptif diatas menggunakan data dalam penelitian tersebut sebanyak 148 data dengan berdasarkan laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2017-2021. Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 25,63 dan memiliki nilai maximum dengan sebesar 29,31, dengan memperoleh nilai rata-rata (*mean*) senilai 26,5962 dan nilai standar deviasi yang sebesar 0,70700. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata (*mean*) dibandingkan nilai standar deviasi hal tersebut dapat menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal sehingga hasil yang telah diperoleh memberikan hasil yang baik. Sedangkan pada Dana Alokasi Umum (DAU) Umum memiliki nilai minimum sebesar 25,65 dan memiliki nilai maximum dengan sebesar 28,20, dengan memperoleh nilai rata-rata (*mean*) senilai 27,5145 dan nilai standar deviasi yang sebesar 0,35791. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata (*mean*) dibandingkan nilai standar deviasi hal tersebut dapat menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal sehingga hasil yang telah diperoleh memberikan hasil yang baik. Sedangkan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) memperoleh

memiliki nilai minimum sebesar 23,02 dan memiliki nilai maximum dengan sebesar 27,11 dengan memperoleh nilai rata-rata (*mean*) senilai 26,0819 dan nilai standar deviasi yang sebesar 0,77762. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata (*mean*) dibandingkan nilai standar deviasi hal tersebut dapat menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal sehingga hasil yang telah diperoleh memberikan hasil yang baik Sedangkan pada Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar 25,06 dan memiliki nilai maximum dengan sebesar 28,64, dengan memperlihatkan nilai rata-rata (*mean*) senilai 26,5666 dan nilai standar deviasi yang sebesar 0,61087. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata (*mean*) dibandingkan nilai standar deviasi hal tersebut dapat menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal sehingga hasil yang telah diperoleh memberikan hasil yang baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas mempunyai tujuan yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid jika digunakan untuk jumlah sampel yang relatif kecil.



Gambar 2
Hasil SPSS Grafik Normal P-P Plot
Sumber: data sekunder diolah tahun 2022

Berdasarkan pada Gambar 2 hasil uji normalitas menunjukkan bahwa tidak memenuhi adanya uji asumsi normalitas, dikarenakan penyebaran pada data (titik-titik) yang berada disekitar sumbu menyebar dan berhempit mengikuti arah pada diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Uji normalitas juga dapat menggunakan uji statistik non-parametik *kolmogorov* yang merupakan nilai atau data residual dengan terstandarisasi berdistribusi normal bila nilai *Asymp. Sig.* > 0,05. Namun apabila nilai atau residual dengan terstandarisasi berdistribusi tidak normal bila nilai *Asymp. Sig.* < 0,05 (Ghozali, 2011).

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		148
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,36395462
Most Extreme Differences	Absolute	0,057
	Positive	0,057
	Negative	-0,052
Test Statistic		0,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal
 b. Calculated from data
 c. Lilliefors Significance Correction
 d. This is a lower bound of the true significance

Sumber: data sekunder diolah tahun 2022

Berdasarkan pada Tabel 2 hasil uji normalitas data dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa setiap masing-masing variabel terstandarisasi berdistribusi normal, dikarenakan hasil dari nilai Asymp. Sig adalah $0,200 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal dapat dikatakan telah terstandarisasi berdistribusi normal dan memenuhi adanya asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan agar dapat mengetahui apakah model regresi didapatkan adanya korelasi antara variabel independen. Cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika terdapatnya nilai *tolerance* > 0.10 atau jika sama dengan nilai $VIF < 10$ maka dapat disimpulkan terjadi tidak multikolinieritas (Ghozali, 2011).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolarence	VIF
1	(Constant)		
	PAD	0,650	1,540
	DAU	0,342	2,925
	DAK	0,441	2,266

a. Dependent Variabel: BM

Sumber: data sekunder diolah tahun 2022

Berdasarkan pada Tabel 3 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa setiap masing-masing variabel tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas, dikarenakan hasil dari Tolerance memiliki hasil lebih besar dibandingkan $0,10$ dan pada hasil VIF memiliki hasil lebih kecil dibandingkan dengan 10 .

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan agar dapat menguji apakah didalam model regresi terdapat adanya korelasi diantara kesalahan pada pengganggu yang ada pada periode t dengan adanya kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ pada sebelumnya (Ghozali, 2011). Menurut Firdaus (2010) apabila nilai *durbin watson* = $1,55 - 2,46$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi

apa-apa. Autokorelasi dapat muncul dikarenakan adanya observasi dengan secara berurutan dalam sepanjang waktu yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,803 ^a	0,645	0,638	0,36773	1,657

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

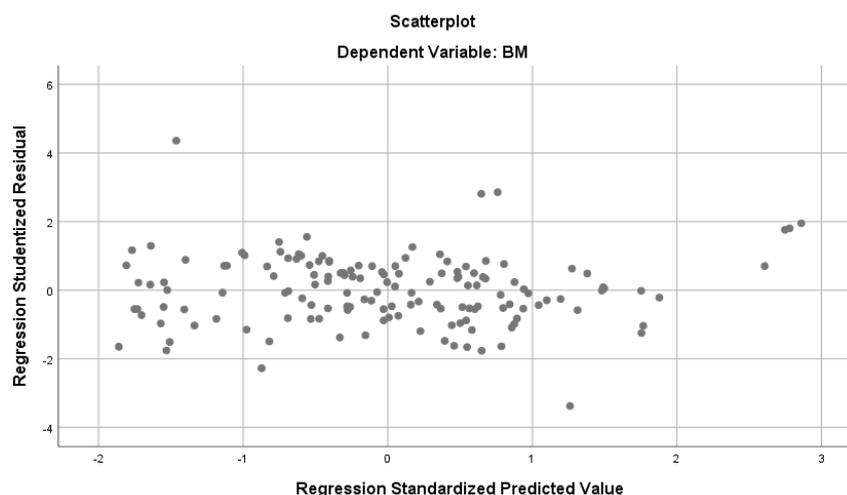
b. Dependent Variabel: BM

Sumber: data sekunder diolah tahun 2022

Berdasarkan pada Tabel 4 hasil uji autokorelasi menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi, dikarenakan hasil dari nilai Durbin Watson yaitu sebesar 1,657 yang berarti berada diantara 1,55 – 2,46. Disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi atau tidak terjadi apa-apa.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas mempunyai tujuan agar dapat menguji apakah didalam model regresi mengalami perbedaan variabel pengganggu dan residual dengan menggunakan satu pengamatan yang ditunjukkan kepada pengamatan yang lain. Agar dapat diketahi adanya dilakukannya dengan adanya pendekatan *scatter plot* diantara suatu prediksi variabel yang terkait antara residualnya.



Gambar 3

Grafik Scatter Plot

Sumber: data sekunder diolah tahun 2022

Berdasarkan Gambar 3 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dikarenakan mendapatkan hasil penyebaran pada data (titik-titik) menyebar dengan secara acak dibagian atas maupun dibagian bawah angka 0 yang terdapat pada sumbu Y (Regression Studentized Residual).

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu model analisis yang dapat dipergunakan dalam mengukur terdapatnya kekuatan hubungan diantara dua variabel yang ada (Ghozali, 2013:95). Analisis regresi linier berganda digunakan agar dapat melihat apa

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-3,794	2,504		-1,515	0,132
	PAD	0,438	0,053	0,507	8,237	0,000
	DAU	0,734	0,141	0,442	5,203	0,000
	DAK	-0,057	0,059	-0,072	-0,969	0,334

a. Dependent Variable: BM

Sumber: data sekunder diolah tahun 2022

Dengan berdasarkan data pada Tabel 5 diatas dapat dilihat, bahwa terdapat hasil dari persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

$$BM = -3,794 + 0,438 \text{ PAD} + 0,734 \text{ DAU} - 0,057 \text{ DAK} + e$$

Dengan berdasarkan model persamaan regresi linier berganda pada Tabel 5 diatas, maka dapat diinterpretasikan pada nilai konstanta memiliki senilai -3,794 yang dapat diartikan, bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus sama dengan 0, maka hasil nilai pada Belanja Modal sebesar -3,794. Pada nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 0,438 yang menunjukkan ke arah positif (searah). Apabila PAD telah mengalami kenaikan sebesar 0,438 maka pada BM mengalami peningkatan dengan nilai yang sama yaitu sebesar 0,438. Maka semakin besar nilai PAD yang didapatkan maka pada nilai BM akan mengalami suatu peningkatan. Pada nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 0,734 yang menunjukkan ke arah positif (searah). Apabila DAU telah mengalami kenaikan sebesar 0,734 maka pada BM mengalami peningkatan dengan nilai yang sama yaitu sebesar 0,734. Maka semakin besar nilai DAU yang didapatkan maka pada nilai BM akan mengalami suatu peningkatan. Sedangkan pada nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebesar -0,057 yang menunjukkan ke arah negatif (tidak searah). Apabila terjadi kenaikan pada DAK maka akan diikuti penurunan pada BM dengan nilai sebesar -0,057. Maka semakin tinggi nilai DAK yang didapatkan maka hasil nilai BM yang didapatkan menjadi semakin rendah.

Uji Hipotesis

Koefisiensi Determinasi

Dengan nilai koefisiensi yang semakin tinggi maka hasil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mendapatkan hasil yang sangat baik pula (Ghozali, 2006). Nilai koefisiensi determinasi merupakan diantara (0) nol dan (1) satu. Jika nilai koefisien mendekati angka 1 maka menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat, namun jika nilai koefisiensi mendekati angka 0 maka menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen dan pengaruh variabel semakin lemah.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,803 ^a	0,645	0,638	0,36773

a. Predictors: (constant), DAK, PAD, DAU

b. Independent variabel: BM

Sumber: data sekunder diolah tahun 2022

Dengan berdasarkan Tabel 6 pada hasil uji koefisiensi determinan mendapatkan hasil R Square yaitu sebesar 0,645 atau 64,5% yang dapat menunjukkan apabila kontribusi PAD, DAU dan DAK terhadap BM Kabupaten/Kota Jawa Timur mempunyai kontribusi yang besar dikarenakan sisanya hanya sebesar 35.5% yang dapat diasumsikan dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (F)

Pada uji kelayakan model (f) saat ini dilakukan agar dapat menguji adanya tingkat keeratan diantara variabel dependen dan juga variabel independen. Agar dapat mengetahui dengan membandingkan nilai Fhitung, Ftabel serta dengan nilai Sig dengan cara apabila Fhitung > Ftabel atau Sig < 0.05 maka dari itu model regresi dinyatakan untuk layak di uji, namun apabila Fhitung < Ftabel atau Sig > 0.05 hal tersebut menyatakan bahwa model tersebut belum layak di uji.

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan Model (f)
Anova^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35,382	3	11,794	87,219	,000 ^b
	Residual	19,472	144	0,135		
	Total	54,854	147			

- a. Dependent Variable: BM
- b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber: data sekunder diolah tahun 2022

Dengan berdasarkan Tabel 7 pada hasil uji kelayakan model (f) diatas memperoleh hasil pada F hitung yaitu sebesar 87,219 dengan nilai Sig yaitu sebesar 0,000 yang berarti nilai Sig 0,000 < 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini dengan secara bersama-sama bersifat pengaruh dengan signifikan terhadap Belanja Modal (BM) pada Provinsi Jawa Timur.

Uji parsial (t)

Uji parsial (t) merupakan uji untuk mempertimbangkan antara nilai yang signifikan uji parsial (t) dengan alpa 5% (Ghozali, 2011). Dengan adanya asumsi jika apabila nilai t hitung yang dilihat dari analisis regresi akan menunjukkan nilai yang kecil dari $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan jika hipotesis yang telah diajukan dapat diterima.

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (t)
Coefficients^{a,f}

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,794	2,504		-1,515	0,132
	PAD	0,438	0,053	0,507	8,237	0,000
	DAU	0,734	0,141	0,442	5,203	0,000
	DAK	-0,057	0,059	-0,072	-0,969	0,334

- a. Dependent Variable: BM

Sumber: data sekunder diolah tahun 2022

Dengan berdasarkan Tabel 8 pada uji t yang terdapat diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t yaitu sebesar 8,237 dengan nilai signifikan yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Pada nilai koefisien regresi memiliki nilai sebesar 0,438. Maka disimpulkan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap BM Provinsi Jawa

Timur. Maka H_1 dalam penelitian ini dapat diterima. Sedangkan pada Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t yaitu sebesar 5,203 dengan nilai signifikan yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Pada nilai koefisien regresi memiliki nilai yaitu sebesar 0,734. Maka disimpulkan variabel DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap BM Provinsi Jawa Timur. Maka H_2 dalam penelitian ini dapat diterima. Sedangkan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai t yaitu sebesar -0,969 dengan nilai signifikan yaitu sebesar $0,334 > 0,05$. Pada nilai koefisien regresi yang memiliki nilai yaitu sebesar -0,057. Maka disimpulkan bahwa pada variabel DAK memiliki hasil tidak pengaruh dan tidak signifikan terhadap BM Provinsi Jawa Timur. Maka H_3 dalam penelitian ini tidak dapat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pada penelitian tersebut dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Belanja Modal memiliki hubungan yang berpengaruh positif dan bersifat signifikan. Hal tersebut dapat dinyatakan apabila terjadi peningkatan pada variabel Pendapatan Asli Daerah, maka terjadi peningkatan juga pada variabel Belanja Modal. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini H_1 menyatakan diterima dan memiliki pengaruh positif. Hal ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan dana yang berasal dari pihak Pemerintah pusat yang diberikan kepada pihak Pemerintah daerah dikarenakan untuk mendanai adanya kebutuhan yang terdapat pada daerah, membantu aset tetap dan aset lainnya yang dapat meningkatkan pembangunan pada daerah serta dapat membantu adanya peningkatan yang terdapat pada kegiatan-kegiatan khususnya yang terdapat pada prasarana dan sarana. Pendapatan Asli Daerah asal mulanya dari sumber-sumber yang terdapat pada wilayahnya sendiri kemudian diambil dengan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Oleh karena itu pihak Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus menerus menciptakan suatu hal yang lebih baik untuk Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat memudahkan dalam adanya pengeluaran yang dilakukan oleh daerah serta memudahkan tidak terjadinya hambatan yang ada pada suatu kegiatan ekonomi yang berhubungan pada Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Pada penelitian tersebut dapat diartikan bahwa variabel Dana Alokasi Umum dan variabel Belanja Modal memiliki hubungan yang berpengaruh positif dan bersifat signifikan. Hal tersebut dapat dinyatakan jika terjadi peningkatan pada Dana Alokasi Umum, maka terjadi peningkatan juga pada Belanja Modal. Sehingga dapat disimpulkan didalam penelitian ini H_2 menyatakan diterima dan memiliki pengaruh positif. Hal ini dapat dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang asal mulanya dari APBN setelah itu dialokasikan dengan beberapa tujuan dalam soal pemerataan keuangan pada daerah, sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum dapat membantu meringankan suatu daerah serta dapat membiayai adanya kebutuhan yang terdapat pada suatu rencana pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya kegiatan transfer yang cukup penting berasal dari pihak Pemerintahan pusat yang akan diberikan kepada pihak Pemerintahan daerah agar Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan bertujuan agar dapat melaksanakan suatu fungsi pelayanan dasar umum salah satunya dengan melakukan pengalokasian Dana Alokasi Umum.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Pada penelitian tersebut dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Khusus terhadap variabel Belanja Modal memiliki hubungan yang berpengaruh negatif dan tidak bersifat signifikan. Hal tersebut dapat dinyatakan jika terjadinya kenaikan pada Dana Alokasi Khusus maka akan diikuti penurunan pada Belanja Modal berlaku sebaliknya jika Dana Alokasi Khusus terjadi

penurunan maka akan diikuti kenaikan pada Belanja Modal. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini H_3 menyatakan ditolak dan pengaruh negatif. Hal tersebut dapat dinyatakan jika terjadinya kenaikan pada Dana Alokasi Khusus maka akan diikuti penurunan pada Belanja Modal berlaku sebaliknya jika Dana Alokasi Khusus terjadi penurunan maka akan diikuti kenaikan pada Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus memiliki dana yang asal mulanya dari APBN kemudian mengalami pengalokasian untuk suatu Daerah yang telah ditentukan. Adanya Dana Alokasi Khusus tersebut mempunyai tujuan agar dapat membantu dalam proses pembiayaan adanya kegiatan-kegiatan khusus yang sudah menjadi urusan pada Daerah sesuai dengan yang ada pada prioritas Nasional. Sehingga Hal ini dapat disebabkan karena Dana Alokasi Khusus setiap kota memiliki nilai yang berbeda-beda serta dalam penggunaannya Dana Alokasi Khusus hanya digunakan dalam hal tertentu yang bersifat khusus.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. dengan populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2020, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah memperlihatkan hasil berpengaruh positif dan bersifat signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat memberikan kesimpulan apabila pihak Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur melakukan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah maka terjadi peningkatan pada biaya anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut guna membiayai adanya kebutuhan yang terdapat pada daerah serta dapat membantu adanya peningkatan pada kegiatan-kegiatan khususnya yang terdapat pada prasarana dan sarana. (2) Dana Alokasi Umum memperlihatkan hasil berpengaruh positif dan bersifat signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat memberikan kesimpulan apabila semakin tinggi daerah menerima Dana Alokasi Umum maka yang terjadi adalah suatu peningkatan pada Belanja Modal. Hal tersebut guna meringankan suatu daerah serta dapat membiayai adanya kebutuhan yang terdapat pada suatu rencana pelaksanaan desentralisasi. (3) Dana Alokasi Khusus memperlihatkan hasil bahwa berpengaruh negatif dan tidak bersifat signifikan terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus setiap kota memiliki nilai yang berbeda-beda serta dalam penggunaannya Dana Alokasi Khusus tidak memerlukan biaya yang banyak dan hanya digunakan dalam hal tertentu saja yang bersifat khusus.

Saran

Dengan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka terdapat beberapa saran yang mungkin dapat digunakan, yaitu sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mampu memperluas ataupun menambah objek penelitiannya yaitu pada Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lainnya khususnya pada variabel independen selain dalam penelitian ini seperti menambahkan variabel SILPA, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil dan lain sebagainya. (2) Bagi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur diharapkan agar lebih meningkatkan serta memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah terutama pada Belanja Modal agar dapat mengurangi dana yang diberikan dari pihak Pemerintah pusat yang dapat menyebabkan ketergantungan. Pada pemerintah daerah diharapkan lebih mampu untuk meratakan pembangunan sarana, prasarana maupun fasilitas yang tersedia sehingga masyarakat yang berada di desa-desa khususnya yang berada di pelosok dan jauh dari perkotaan dapat menikmati sarana, prasarana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah

daerah. Sehingga terciptanya pelayanan yang baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan R. Rona. 2014. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Beanja Modal. *Iqtishadia* 7(1).
- Badrudin, R. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Badjra, B. I., I. K. Mustanda, dan N. Abundati. 2017. Kontribusi Pendapatan Silpa Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6(1): 29-40.
- Basuki. 2018. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Kreasi. Yogyakarta.
- Felix, O. 2012. Analysis Of The Effectiveness Of Capital Expenditure Budgeting In The Local Government System Of Ondo State Nigeria. *Journal of accounting and taxation* 4(1): 1-6.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Edisi Keempat. Badan Penerbit Universitas. Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 17*. Cetakan Kelima. Badan Penerbit Universitas. Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas. Diponegoro. Semarang.
- Hairiyah, H., L. Malisan, dan Z. Fakhroni. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendaptan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. *Journal FEB Unmul* 14(2): 85-91.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Hartati, D. H. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional, Bruto, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kota Balikpapan. *E-Journal Ekonomika-Bisnis* 4(2): 113-130.
- Jemparut, S. M. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(9).
- Juniawan, A. M. dan N. P. S. Suryantini. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(3).
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Novianto, R. dan R. Hanafiah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi* 4(1).
- Nurchois, H. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Daerah Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Nurzem, M. 2016. Pengaruh Pertyumbuhan Ekonomi, Pendapatan Ali Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal dan Ilmu Riset Akuntansi* 5(4).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 *Tentang Standar Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Rahmat, A. A. N. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Serta Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di kota Semarang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman* 3(4).
- Rahmawati, R. 2018. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jurnal Kajian Bisnis* 26(2): 195-209.

- Santosa, B. A. dan M. A. Rofiq. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 20(2): 184-198.
- Santoso, F. S., S. Batasyam, dan S. B. Astuti. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *JIAP* 1(2): 94-105.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sularso, H. dan Y. E. Restiano. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi* 1(2).
- Susanti, S. dan H. Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMIEKA)* 1(1): 183-191.
- Tiningrum, S. I., I. Indarti, dan W. A. Adnanti. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Alami Aset* 22(2): 131-146.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Yovita, F. M. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Modal Empiris Pada Pemerintah Provinsi Indonesia Periode 2008-2010). *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Universitas Diponegoro.